



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon dan Faksimile : (0711) 411007 - (0711) 411199 Kode Pos 30128
website : www.dpmptspsumselprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 408/KPTS/DPMPTSP.I/XI/2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap organisasi perangkat daerah menyusun Rencana Kerja;
 - b. bahwa Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode (satu) tahun;
 - c. bahwa untuk melaksanakan peraturan menteri tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

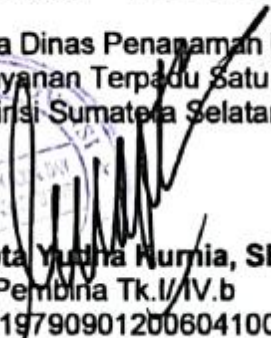
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

- Pertama : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 disusun:
- Mengacu pada Rancangan Awal RKPD;
 - Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2023;
 - Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana strategis.
- Kedua : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP Tahun Anggaran 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun;
- Ketiga : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.
 - Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - Bab V : Penutup.
- Keempat : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 November 2022

Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan, 


H. Lusapta Yutha Hurnia, SE, MM
Pembina Tk.IV/b
NIP. 197909012006041008

KATA PENGANTAR

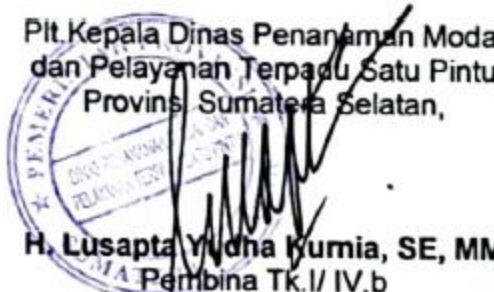
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam satu tahun dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu Renja berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini memuat program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Priode 2019-2023 tahun keempat serta memperhatikan hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program, kegiatan yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di bidang penanaman modal sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan realisasi investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Sumatera Selatan.

Palembang, Nopember 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kumia, SE, MM
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 197909012006041008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan.....	3
4. Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	49
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	52
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	66
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	67
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	69
3. Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah	70
4. Program dan Kegiatan	85
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	102
 BAB V PENUTUP	
	106

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dalam rangka memenuhi maksud tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan uraian dari Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.

Renja 2023 ini digunakan sebagai dasar penetapan Pagu Definitif dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (berita Daerah Nomor 42);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dan sebagai acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
3. Dasar perencanaan tahunan untuk penetapan pagu definitif dan penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
4. Menghubungkan RPJMD, Renstra, Rencana Tindak, maupun perencanaan operasional yang terinci;
5. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran;
6. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja;

7. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik peningkatan kinerja;
8. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit pelayanan;
9. Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan kinerja.

4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang perlunya penyusunan Renja-SKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja SKPD.

2. BAB II: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Renstra Dinas PMPTSP tahun lalu, menganalisis kinerja perangkat Dinas PMPTSP, menjelaskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP serta menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan.

3. BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

Menelaah kebijakan nasional yang terkait Dinas PMPTSP, memuat tujuan dan sasaran Renja yang akan dicapai serta program dan kegiatan prioritas Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

4. BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Menyusun dan menguraikan rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

5. BAB V: PENUTUP

Menjelaskan tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Program dan kegiatan yang dialokasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, berdasarkan APBD Perubahan sebanyak 8 Program dan 37 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
8.	Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Provinsi
9.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Sumatera Selatan
III.	Program Promosi penanaman modal
10.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi
IV.	Program Pelayanan Penanaman Modal
11.	Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Provinsi
V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
12.	Pengendalian Pelaksanaan Penanama Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
VI.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
13.	Urusan Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang terintegresi pada Tingkat Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk melaksanakan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Pagu Anggaran Awal sebesar **Rp.25.195.480.600,-** (Dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Selanjutnya terjadi perubahan pagu anggaran dikarenakan adanya penambahan Dana DAK Non Fisik dan Perubahan Regulasi terhadap Belanja Pegawai, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) . Berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, alokasi anggaran APBDP DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung menjadi sebesar **Rp. 25.809.974.905,-** (Dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Pagu anggaran awal	Rp. 23.650.459.748,-	
Pagu anggaran perubahan	Rp. 24.881.954.053,-	
Realisasi	Rp. 17.387.865.164,-	(69,88 %)
Sisa pagu anggaran	Rp. 7.494.088.889,-	(30,12 %)

b. Belanja Modal

Pagu anggaran awal	Rp. 1.545.020.852,-	
Pagu anggaran perubahan	Rp. 928.020.852,-	
Realisasi	Rp. 908.337.366,-	(97,88 %)
Sisa pagu anggaran	Rp. 19.683.486,-	(2,12 %)

Rincian realisasi keuangan dan fisik per Program dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, jumlah dana sebesar **Rp.21.717.922.905,-**

Realisasi keuangan	Rp. 14.644.615.318,-	(67,43%)
Sisa anggaran	Rp. 7.073.307.587,-	(32,57%)
Realisasi Fisik		(92,26%)

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 700.000.000,-**

Realisasi keuangan	Rp. 588.588.516,-	(84,08 %)
Sisa anggaran	Rp. 111.411.484,-	(15,92 %)
Realisasi Fisik		(100 %)

3. Program Promosi penanaman modal

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 1.080.000.000,-**

Realisasi keuangan Rp. 1.028.929.823,- (95,27 %)

Sisa anggaran Rp. 51.070.177,- (4,73 %)

Realisasi Fisik (100 %)

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 785.000.000,-**

Realisasi keuangan Rp. 724.337.523,- (92,27 %)

Sisa anggaran Rp. 60.662.477,- (7,73 %)

Realisasi Fisik (100 %)

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 1.257.052.000,-**

Realisasi keuangan Rp. 1.041.686.478,- (82,87 %)

Sisa anggaran Rp. 215.365.522,- (17,13 %)

Realisasi Fisik (100 %)

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 270.000.000,-**

Realisasi keuangan Rp. 268.044.872,- (99,28 %)

Sisa anggaran Rp. 1.955.128,- (0,72 %)

Realisasi Fisik (100 %)

Secara rinci dapat dijelaskan realisasi anggaran per program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Program

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi** dengan pagu anggaran Rp. **21.717.922.905,-** (*dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah*), realisasi sebesar Rp.**14.644.615.318,-** tercapai 67,43%, hal tersebut dikarenakan pada sub kegiatan gaji dan tunjangan asn tidak terealisasi, karena besaran sk tunjangan kinerja mengalami perubahan. Dari anggaran **Rp. 7.012.000.000,-** (*tujuh milyar dua belas juta rupiah*) sesuai dengan surat keputusan gubernur nomor 708/KPTS/DPMPTSP/2019 tentang penyelenggara pelayanan perizinan dan non

perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi sumatera selatan yang telah dirubah melalui surat sekretaris daerah provinsi sumatera selatan No. 4122/BPKAD-I/2022 perihal pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja tanggal 22 November 2022, dengan diterbitkannya surat keputusan gubernur sumatera selatan Nomor : 310/KPTS/VII/2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan dan dibayarkan hanya 6 (enam) bulan terhitung dari bulan juli sampai dengan bulan desember dengan realisasi sebesar **Rp.1.382.800.000,-** (*satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan sisa anggaran (silpa) sebesar **Rp.5.629.200.000,-** (*lima milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*),

2. **Program pengembangan iklim penanaman modal** dengan anggaran **Rp. 700.000.000,-** (*tujuh ratus juta rupiah*), dengan capaian realisasi **Rp. 588.588.516,-** (*lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah*), tercapai 84,08%, dengan sisa lebih sebesar **Rp.111.411.484,-** (*seratus sebelas juta empat ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*) hal tersebut dikarenakan honorarium jasa tim pada kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi dan honorarium jasa tim kegiatan penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal tidak bisa di realisasikan, karena tidak dibayar oleh bendahara umum daerah (bud).
3. **Program promosi penanaman modal** dengan anggaran **Rp.1.080.000.000,-** (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*), dengan capaian realisasi **Rp.1.028.929.823,-** (*satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*). Tercapai 95,27%. Telah terealisasi dengan baik, dengan sisa lebih sebesar **Rp. 51.070.177** (*lima puluh satu juta tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
4. **Program pelayanan penanaman modal** dengan anggaran **Rp.785.000.000,-** (*tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dengan capaian realisasi **Rp. 724.337.523,-** (*tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*). Tercapai 92,27%. Telah terealisasi dengan baik,

dengan sisa lebih sebesar **Rp.60.662.477** (*enam puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

5. **Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal** dengan anggaran **Rp. 1.257.052.000,-** (*satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah*) dengan capaian realisasi **Rp. 1.041.686.478,-** (*satu milyar empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*). Tercapai 82,87%. Dikarenakan terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dari kementerian investasi/bkpm-ri baru terbit menjelang akhir semester I terhadap penggunaan dana alokasi khusus non fisik.
2. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaku usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sejumlah 11.462 dan jumlah perusahaan sebesar 3.060 atau pelaku usaha.

Sebagai masukan upaya dan strategi tersebut kedepannya kami berharap dukungan tambahan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana operasional (kendaraan roda empat) dan pendukung lainnya.

6. **Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal** dengan anggaran **Rp 270.000.000,-** (*dua ratus tujuh puluh rupiah*) dengan capaian realisasi **Rp. 268.044.872,-** (*dua ratus enam puluh delapan juta empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*.) Tercapai 99,28%. Telah terealisasi dengan baik.

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Tidak ada permasalahan

2. Solusi

Tidak ada solusi

TABEL 2.1. (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai dengan Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SUMSEL

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	TARGET PENCAPAIAN	PAGU APBD Awal (Rp)	PAGU APBDP (Rp)	REALISASI BULAN (Rp)	KET
							TOTAL (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	20	21
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai		100%	21.103.428.600	21.717.922.905	14.644.615.318	
2.18.01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		100%	335.000.000	306.200.000	247.565.851	
2.18.01. 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD tahun n+1 yang tersusun	Palembang	3 Dokumen (Renstra revisi, RKT dan Renja 2023)	200.000.000	171.200.000	167.430.351	
2.18.01. 1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	23.788.500	
2.18.01. 1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	7.960.000	

2.18.01. 1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	14.172.000	
2.18.01. 1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	14.375.000	
2.18.01. 1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Palembang	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	19.015.000	
2.18.01. 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Palembang	3 Laporan (LKPJ, LPPD, LkJIP)	30.000.000	30.000.000	825.000	
2.18.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana		100%	17.227.208.000	18.418.479.000	11.463.669.080	
2.18.01. 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Palembang	100%	16.296.808.000	17.488.079.000	10.602.484.930	
2.18.01. 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Jumlah tenaga pendukung Adm perkantoran yang terbayar jasanya setiap bulan selama 1 tahun	Palembang	35 orang 1 tahun	812.760.000	812.760.000	744.690.000	
2.18.01. 1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terbayarnya jasa 9 org pengelola adm keuangan	Palembang	9 org 1 tahun	92.640.000	92.640.000	92.640.000	
2.18.01. 1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palembang	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	9.753.150	

2.18.01. 1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporang keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	14.101.000	
2.18.01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai		100%	153.560.000	203.560.000	200.810.000	
2.18.01. 1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas kuning kaki untuk aparat	Palembang	120 stel	103.560.000	103.560.000	102.960.000	
2.18.01. 1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus	Dalam dan Luar Provinsi	1 Tahun	50.000.000	100.000.000	97.850.000	
2.18.01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai		100%	903.683.600	882.483.600	869.498.086	
2.18.01. 1.06..01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit/pcs tersedianya komponen instalansi listrik	Palembang	1 tahun	30.000.000	30.000.000	29.984.594	
2.18.01. 1.06..02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Palembang	25 unit	119.683.600	119.683.600	117.577.366	
2.18.01. 1.06..04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan jumlah pcs bahan pembersih yang tersedia	Palembang	300 buah	28.000.000	28.000.000	27.869.700	
		Jumlah pcs tersedianya Alat Tulis Kantor	Palembang	1 tahun	125.000.000	125.000.000	114.973.720	

		Frekuensi penyediaan makan dan minum untuk rapat/tamu	Palembang	1 tahun	80.000.000	80.000.000	79.927.760	
2.18.01.1.06..05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan	Palembang	1 tahun	90.000.000	90.000.000	89.827.700	
2.18.01.1.06..06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah expsemplar/ buku yang tersedia	Palembang	2160 eksemplar	11.000.000	11.000.000	10.828.000	
2.18.01.1.06..09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Dalam dan Luar Provinsi	120 kali (59 DD, 60 LD, 1 LN)	420.000.000	398.800.000	398.509.246	
2.18.01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tercapai		100%	1.234.000.000	558.000.000	554.550.000	
2.18.01. 1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis meubeleu yang tersedia	Palembang	15 unit	105.000.000	105.000.000	104.760.000	
2.18.01. 1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Area Tempat Parkir kendaraan bermotor yang tersedia	Palembang	1 unit	480.000.000	238.000.000	449.790.000	
		Jumlah Normalisasi dan rehabilitasi saluran lingkungan kantor DPMPTSP yang tersedia	Palembang	1 unit	450.000.000	-	-	
		Tersedianya Interior Ruang Media Center PTSP	Palembang	1 unit	199.000.000	215.000.000	-	

2.18.01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai		100%	578.400.000	578.400.000	572.384.775	
2.18.01. 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersedia	Palembang	400 dok/surat	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
2.18.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, PDAM, dan listrik yang dibayar	Palembang	48 Kwitansi rekening	375.000.000	375.000.000	371.334.075	
2.18.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi terbayarnya jasa tutor SKJ	Palembang	44 Kali	15.400.000	15.400.000	14.350.000	
		Frekwensi tersedianya jasa kebersihan gedung kantor	Palembang	1 tahun	180.000.000	180.000.000	178.700.700	
2.18.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional		100%	671.577.000	770.800.305	736.137.526	
2.18.01. 1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan tersedia operasionalnya	Palembang	15 unit (5 R2, 10 R4/ Bln)	330.000.000	330.000.000	297.762.776	
2.18.01. 1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	1 tahun	40.000.000	40.000.000	39.799.000	

2.18.01. 1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara	Palembang	1 tahun	301.577.000	282.252.750	398.575.750	Hutang Pemeliharaan tahun 2021
		Jumlah pagar kantor yang direhabilitasi	Palembang	1 unit	-	118.547.555	-	
2.18.02.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi		7%	750.000.000	700.000.000	588.588.516	
2.18.02. 1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal		100%	500.000.000	450.000.000	374.663.800	
2.18.02. 1.01.01	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kemitraan/kesepakatan dan Jumlah Kajian Kemitraan	17 kab/kota	20 kerjasama (17 kab/kota), 1 Dokumen Kajian	250.000.000	250.000.000	374.663.800	Pergeseran pagu anggaran belanja dan penambahan kode rekening belanja
		Jumlah Perda yang direvisi	Palembang	1 perda revisi	250.000.000	200.000.000	-	
2.18.02. 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase peta potensi investasi provinsi yang tersusun		100%	250.000.000	250.000.000	213.924.716	
2.18.02. 1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah RUPM yang dievaluasi	Dalam dan Luar Provinsi	3 RUPM	90.000.000	90.000.000	55.393.460	
2.18.02. 1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah dokumen kajian pemetaan potensi dan peluang investasi.	Dalam dan Luar Provinsi	1 dokumen	160.000.000	160.000.000	158.531.256	

2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (trilyun)		20,47	1.080.000.000	1.080.000.000	1.028.929.823	
		Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (trilyun)		9,79			-	
2.18.03. 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase promosi penanaman modal yang diselenggarakan		100%	1.080.000.000	1.080.000.000	1.028.929.823	
2.18.03. 1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Promosi, Jumlah website dan Media sosial yang dikelola	Dalam dan Luar Daerah	1 Event, 2 Jenis	430.000.000	430.000.000	396.465.302	
2.18.03. 1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah pameran yang diikuti, Tersedianya Sarana dan Sarana, serta Website dan Media Sosial yang dikelola	Dalam dan Luar Daerah	3 Event, 3 Jenis, 2 Jenis	650.000.000	650.000.000	632.464.521	
2.18.04.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Investor (angka)		89,65	785.000.000	785.000.000	724.337.523	
		Jumlah perizinan dan non-perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP (angka)		1036			-	
2.18.04. 1.02	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan		100%	785.000.000	785.000.000	724.337.523	

2.18.04. 1.02.01	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	Dalam dan Luar Provinsi	1036 perizinan/ perizinan	550.000.000	550.000.000	507.284.862	
		Pelaku usaha yang memahami sistem aplikasi perizinan dan non perizinan online dalam rangka mengurus izin	Dalam dan Luar Provinsi	100 orang			-	
		Petugas PTSP terlatih	Dalam dan Luar Provinsi	100 orang			-	
		Jumlah peta digital sebaran izin di DPMPTSP Prov. Sumsel	Dalam dan Luar Provinsi	17 Kab/Kota			-	
2.18.04. 1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Perusahaan/investor yang terlayani prima	17 kab/kota	50 perusahaan	235.000.000	235.000.000	217.052.661	
		Jumlah perusahaan/ investor yang berpartisipasi	17 kab/kota	60 orang			-	
		Jumlah Laporan hasil penyusunan IKI	17 kab/kota	10 laporan			-	
		Jumlah aplikasi pelayanan publik yang tersedia	17 kab/kota	1 aplikasi			-	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	tercapainya nilai realisasi investasi PMA dan PMDN		30,26 T	1.257.052.000	1.257.052.000	1.041.686.478	

2.18.05. 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha		90%	1.257.052.000	1.257.052.000	1.041.686.478	
2.18.05. 1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM online perusahaan PMDN yang dipantau	17 kab/kota	1400 LKPM	319.520.000	200.000.000	177.964.461	
2.18.05. 1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan/ investor yang dibina tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal	6 kab/kota (Muara Enim, Lubuk linggau, OKU, MUBA, Prabumulih, Lahat)	580 Pelaku Usaha/ Investor	504.005.000	623.525.000	471.672.460	
2.18.05. 1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme/ pelaksanaan BAP	17 kab/kota	50 BAP	433.527.000	433.527.000	392.049.557	
2.18.06.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)		7%	220.000.000	270.000.000	268.044.872	
2.18.06. 1.01	Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.		100%	220.000.000	270.000.000	268.044.872	

2.18.06. 1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.	Palembang	3 Dokumen	220.000.000	270.000.000	268.044.872	Pergeseran pagu anggaran belanja dan penambahan kode rekening belanja Modal (tanda - ada salah penarikan dana pada data seharusnya dana sekretariat)
				Jumlah	25.195.480.600	25.809.974.905	18.296.202.530	

2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Sumsel

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, maka analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dijelaskan berdasarkan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Maju Investasi

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian pada sasaran I mempunyai 4 (empat) indikator kinerja,

Sasaran 2 : Maju Pelayanan Publik Berkualitas

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada dpmptsp provinsi sumatera selatan capaian indikator kinerja utama sesuai dengan target renstra pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022		Persentase Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1		2	3	4	5
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun Rp	20,47 T	17,60 T	85,97
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Triliun Rp	16,50 T	23,52 T	142,54
3	Jumlah Investor	Perusahaan/Unit Usaha	381	1029	270,07
4	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	7	45,28	646,86
5	Indeks Kepuasan Investor	Angka	89,65 (A)	89,69 (A)	100,04
6	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diselesaikan tepat Waktu Sesuai SOP	Angka	650	1637	251,84

Pencapaian Target Realisasi Investasi Berdasarkan Renstra Provinsi Sumatera Selatan Sebesar 36,97 Trilyun Rupiah Telah Tercapai Sebesar 111,22 %, Dan Target Realisasi Investasi Nasional Sebesar 41 Trilyun Rupiah Telah Melampaui Target Sebesar 41,12 Trilyun Rupiah Atau Sebesar 100,29 %

TABEL CAPAIAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2022

Uraian	Triwulan I, II, III, IV				
	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah LKPM	Jumlah	Tenaga Kerja	
			Perusahaan	TKI (org)	TKA (org)
PMA	17.596.759.587.758,20 17,6 Trilyun	695	145	7.381	168
PMDN	23.525.965.100.000,00 23,5 Trilyun	4.084	801	28.012	19
Total	41.122.724.687.758,20 41,12 Trilyun	4.779	946	35.393	187

Secara ringkas Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2. (Tabel T.C. 30) sebagaimana terlampir.

Tabel 2.2 (Tabel T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA DPMPTSP Provinsi Sumsel				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021 (Seme ster II)	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Pertumbuhan investasi (%)			7%	7%	7%	7%	37,11 %	8.61%	7%	7%	
2.	Realisasi PMA (T)			17,88 T	19,13 T	20,47 T	21,90 T	22,53 T	3,25 T	20,47 T	21,90 T	
3.	Realisasi PMDN (T)			8,55 T	9,14 T	9,79 T	10,47 T	15,82 T	2,99 T	9,79 T	10,47 T	
4.	Indeks Kepuasan Investor (Indeks)			89,55	89,6	89,65	89,70	91,20	91,20	89,65	89,70	
5.	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP (Unit)			974	1006	1036	1064	601	195	1036	1064	
6.	Jumlah Investor (UU/Investor)			357	369	381	393	629	315	381	393	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan berdasarkan pada beberapa faktor, yaitu :

1. Gambaran tingkat pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terhadap capaian program nasional;
4. Tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam bidang penanaman modal;
5. Visi, Misi dan Sasaran Jangka Menengah dalam Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Dari pembahasan permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong sebelumnya, diidentifikasi isu strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam membuat regulasi yang bersifat mempermudah dan mempercepat perizinan/non perizinan melalui prosedur perizinan yang tepat, efektif dan efisien.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penanaman modal yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- c. Pengawasan pelaksanaan implementasi OSS di kabupaten/kota dan investor/calon investor untuk meningkatkan jumlah investor dan proyek yang bernilai investasi guna meningkatkan nilai realisasi investasi.
- d. Jenis peluang usaha/proyek yang ditawarkan merupakan peluang usaha inovasi baru yang dapat menarik minat investor asing dan lokal.
- e. Promosi investasi yang belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran.
- f. Sebaran Investasi yang belum merata di kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan

- g. Peningkatan kesadaran perusahaan PMA dan PMDN untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal dalam bentuk LKPM
- h. Harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan di bidang penanaman modal, baik dengan pusat dan dengan daerah (kab/kota);
- i. Belum terakomodirnya investor yang berminat berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung terutama kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain-lain;
- j. Masih terbatasnya investor pengembangan investasi di bidang industri hilirisasi;
- k. Peningkatan kapasitas Kinerja Aparatur penanaman modal untuk mengoptimalkan kinerja PTSP sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mendukung terwujudnya pelayanan perizinan/non perizinan yang berkualitas.
- l. Informasi Potensi Unggulan Daerah belum terpadu dan terbaru setiap waktu, sedangkan masyarakat dan pelaku dunia usaha membutuhkan data/informasi yang terbaru, cepat dan terpercaya di bidang penanaman modal di Sumatera Selatan;
- m. Belum operasionalnya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

Investasi merupakan salah satu fokus utama kebijakan pemerintah sebagai variabel penting dalam meningkatkan perekonomian. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan regulasi investasi juga harus diberi perhatian khusus sebagai salah satu dari tiga tugas pokok yang terdapat dalam MP3EI (*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*) yang telah dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 27 Mei 2011. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengkoordinasikan investasi penanaman modal terus berupaya memperbaiki kinerja dengan menentukan berbagai langkah strategis, terarah dan terencana.

Konsep perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengabaikan dalam memberi penekanan pada pentingnya analisis terhadap kapasitas lembaga dan aparatur untuk menjawab tantangan lingkungan internal dan eksternal yang terus berubah. Secara singkat berbagai situasi yang mempengaruhi kinerja

investasi pada akhirnya menjadi faktor prioritas yang menjadi pertimbangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam membuat Rencana Strategis lima tahun ke depan.

Provinsi Sumatera Selatan disamping memiliki berbagai keunggulan yaitu potensi dan peluang usaha yang berlimpah, juga memiliki berbagai keterbatasan apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Keterbatasan tersebut antara lain mencakup luas ruang dan lahan yang terus semakin berkurang, kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang masih terbatas.

Dengan demikian maka pengembangan Investasi perlu diposisikan sebagai visi dan fokus pembangunan kedepan terlebih bagi Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang sedang maju dan berkembang, mandiri dan mampu mengemban peningkatan kualitas dan kesejahteraan seluruh penduduknya melalui kegiatan Investasi.

Isu-isu strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, dengan memperhatikan berbagai sudut pandang yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Isu yang memiliki nilai strategis untuk dilaksanakan.
- b. Isu yang sedang dalam proses dan sedang dibicarakan.
- c. Isu yang secara langsung menyangkut kepentingan PMA ataupun PMDN.
- d. Isu yang realistis dan logis untuk dibahas sesuai dengan hak, wewenang, dan tanggung jawab DPMPTSP.

Dari berbagai identifikasi maka ditetapkan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan di bidang penanaman modal, baik antar instansi pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;

2. Kurangnya minat investor dalam berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain- lain;
3. Masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanaman modal baik perusahaan PMA maupun PMDN;
4. Masih terbatasnya investor untuk pengembangan investasi di bidang industri hilirisasi;
5. Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/ Kota dan bidang usaha tertentu;
6. Masih cukup panjangnya proses perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan dengan negara- negara kompetitor;
7. Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam membuat LKPM dibandingkandengan besarnya jumlah perusahaan PMA/ PMDN di Sumatera Selatan;
8. Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/ PMDN yang berada di Kab/ Kota;
9. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperolehdata/ informasi penanaman modal di Sumatera Selatan;
10. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/ Kota.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] tahun anggaran 2023 tidak terlepas dari kondisi yang saat ini terjadi pada semester I tahun anggaran 2022 dimana isu global pandemic wabah *Corona Virus Diseases (Covid 19)* yang semakin tidak jelas dan belum terkendali dengan baik. Upaya pencegahan penyebaran *Covid 19* membutuhkan alokasi anggaran yang tak sedikit sehingga menyebabkan adanya kebijakan

refocusing dan realokasi anggaran secara radikal. Kondisi ini menjadi cerminan terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 untuk memulihkan kondisi ekonomi dan jaminan kesehatan masyarakat.

Ada pun tema dan prioritas daerah Provinsi Sumatera Selatan pada rancangan awal RKPD tahun 2023 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima, dengan prioritas daerah sebagai berikut :

- i. Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
- ii. Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata.
- iii. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
- iv. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragama.

Review Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan terhadap rancangan awal RPKD Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada prioritas daerah Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata dimana Program Prioritas Daerah untuk mendukung ini adalah Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragama. Hasil review tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.

Tabel 2.3 (T.C. 31)

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
 Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan
 Hasil Penyesuaian Nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi		Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai	100%	21.103.428	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi		Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai	100%	22.319.345	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	335.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	630.000	reformasi Akuntabilitas Kinerja
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah dokumen perencanaan OPD tahun n+1 yang tersusun	2 Dokumen (Renstra revisi, dan Renja 2022)	200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah dokumen perencanaan OPD tahun n+1 yang tersusun	2 Dokumen (Renstra, dan Renja 2023)	350.000	reformasi Akuntabilitas Kinerja
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	25.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	25.000	reformasi Akuntabilitas Kinerja
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	20.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	20.000	reformasi Akuntabilitas Kinerja

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	20.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	20.000	reformasi Akuntabilitas Kinerja
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	15.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	15.000	reformasi Akuntabilitas Kinerja
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Palembang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	1 Laporan	25.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Palembang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	1 Laporan	50.000	reformasi Akuntabilitas Kinerja
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Laporan	30.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5 Laporan	150.000	reformasi Akuntabilitas Kinerja
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana	100%	17.227.208	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana	100%	17.227.208	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100%	16.296.808	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	16.296.808	Transformasi Layanan Publik
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Palembang	Jumlah tenaga pendukung Adm perkantoran yang terbayar jasanya setiap bulan selama 1 tahun	33 orang 1 tahun	812.760	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Palembang	Jumlah tenaga pendukung Adm perkantoran yang terbayar jasanya setiap bulan selama 1 tahun	1 tahun	812.760	Transformasi Layanan Publik
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	Jumlah bulan terbayarnya jasa 2 org pengelola adm keuangan	7 org / 84 Bulan	92.640	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	Jumlah bulan terbayarnya jasa 2 org pengelola adm keuangan	7 org / 84 Bulan	92.640	Transformasi Layanan Publik
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palembang	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	10.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palembang	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	10.000	Transformasi Layanan Publik

	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	15.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Palembang	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	15.000	Transformasi Layanan Publik
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	100%	153.560	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	100%	298.560	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Palembang	Jumlah stel pakaian Olahraga untuk aparatur	-	-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Palembang	Jumlah stel pakaian Olahraga untuk aparatur	120 stel	120.000	Transformasi Layanan Publik
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Palembang	Jumlah stel pakaian dinas kuning kaki untuk aparatur	120 stel	103.560	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Palembang	Jumlah stel pakaian dinas kuning kaki untuk aparatur	120 stel	103.560	Transformasi Layanan Publik
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus	8 Orang	50.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus	15 Orang	75.000	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang tercapai	100%	903.683	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang tercapai	100%	1.180.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palembang	Jumlah unit/pcs tersedianya komponen instalansi listrik	1 tahun	30.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palembang	Jumlah unit/pcs tersedianya komponen instalansi listrik	1 tahun	50.000	Transformasi Layanan Publik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 unit	119.683	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	35 unit	250.000	Transformasi Layanan Publik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah unit tersedianya peralatan dan jumlah pcs bahan pembersih yang tersedia	300 buah	28.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah unit tersedianya peralatan dan jumlah pcs bahan pembersih yang tersedia	300 buah	40.000	Transformasi Layanan Publik

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah pcs tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	125.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah pcs tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	150.000	Transformasi Layanan Publik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Frekuensi penyediaan makan dan minum untuk rapat/tamu	1 tahun	80.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Frekuensi penyediaan makan dan minum untuk rapat/tamu	1 tahun	90.000	Transformasi Layanan Publik
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Palembang	Jumlah lembar barang cetakan dan penggadaan	1 tahun	90.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Palembang	Jumlah lembar barang cetakan dan penggadaan	1 tahun	120.000	Transformasi Layanan Publik
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah expsemplar/ buku yang tersedia	2160 eksemplar	11.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah expsemplar/ buku yang tersedia	2160 eksemplar	30.000	Transformasi Layanan Publik
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang diikuti	90 kali (30 DD, 60 LD)	420.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang diikuti	90 kali (30 DD, 60 LD)	450.000	Transformasi Layanan Publik
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang tercapai	100%	1.234.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang tercapai	100%	1.475.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang tersedia	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang tersedia	2 unit (R-4)	750.000	Transformasi Layanan Publik
	Pengadaan Mebel	Palembang	Jumlah jenis meubeleur yang tersedia	15 unit	105.000	Pengadaan Mebel	Palembang	Jumlah jenis meubeleur yang tersedia	15 unit	250.000	Transformasi Layanan Publik
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Area Tempat Parkir kendaraan bermotor yang tersedia	1 Unit	480.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	Transformasi Layanan Publik
			Jumlah Normalisasi dan rehabilitasi saluran lingkungan kantor DPMPTSP yang tersedia	1 Unit	450.000		Palembang	Jumlah Normalisasi dan rehabilitasi saluran lingkungan kantor DPMPTSP yang tersedia	1 Unit	350.000	

			Tersedianya Interior Ruang Media Center PTSP	1 Unit	199.000		Palembang	Tersedianya Interior Ruang Media Center PTSP	1 Unit	125.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai	100%	578.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai	100%	685.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersedia	400 dok/surat	8.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersedia	400 dok/surat	15.000	Transformasi Layanan Publik
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah rekening jasa komunikasi, PDAM, dan listrik yang dibayar	48 Kwitansi rekening	375.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah rekening jasa komunikasi, PDAM, dan listrik yang dibayar	48 Kwitansi rekening	450.000	Transformasi Layanan Publik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palembang	Frekuensi terbayarnya jasa tutor SKJ	1 tahun	15.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palembang	Frekuensi terbayarnya jasa tutor SKJ	1 tahun	20.000	Transformasi Layanan Publik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palembang	Frekwensi tersedianya jasa kebersihan gedung kantor	1 tahun	180.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palembang	Frekwensi tersedianya jasa kebersihan gedung kantor	1 tahun	200.000	Transformasi Layanan Publik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional	100%	671.577	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional	100%	823.577	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan tersedia operasionalnya	15 unit (5 R2, 10 R4/ Bln)	330.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan tersedia operasionalnya	16 unit (5 R2, 11 R4/ Bln)	400.000	Transformasi Layanan Publik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit gedung kantor	185.000	Transformasi Layanan Publik

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	198.577	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	198.577	Transformasi Layanan Publik
			Jumlah pagar kantor yang direhabilitasi	1 unit	103.000					0	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Palembang	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	40.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Palembang	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	40.000	Transformasi Layanan Publik
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	7%	750.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	7%	1.160.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang tercapai	100%	500.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang tercapai	100%	550.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	17 kab/kota	Jumlah kemitraan/kesepakatan dan jumlah kajian kemitraan	20 kerja sama, 1 dokumen kajian	250.000	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	5 kab/kota	Jumlah kemitraan/kesepakatan	8 kerja sama	550.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
		Palembang	Jumlah Perda yang direvisi	1 perda revisi	250.000					0	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Persentase peta potensi investasi provinsi yang tersusun	100%	250.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Persentase peta potensi investasi provinsi yang tersusun	100%	610.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi

											Ketenagakerjaan
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah RUPM yang dievaluasi	3 RUPMP	90.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah dokumen Revisi Pergub RUPMP yang diselesaikan.	3 RUPM	250.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah dokumen kajian pemetaan potensi dan peluang investasi yang tersusun	1 dokumen	160.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah dokumen kajian pemetaan potensi dan peluang investasi yang tersusun	1 paket dokumen	360.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
3	Program Promosi Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (trilyun)	20,47	1.080.000	Program Promosi Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (trilyun)	21,90	1.380.000	
			Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (trilyun)	9,79				Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (trilyun)	10,47		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase promosi penanaman modal yang diselenggarakan	100%	1.080.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase promosi penanaman modal yang diselenggarakan	100%	1.380.000	

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Publikasi Promosi, jumlah Website dan media soseal yang dikelola.	1 event, 2 jenis	430.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Publikasi Promosi yang dilaksanakan	5 kegiatan	530.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Invetsasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pameran yang diikuti, tersedianya sarana prasarana, sera website dan media sosial yang dikelola.	3 event, 3 jenis, 2 jenis	650.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pameran yang diikuti	2 kegiatan	850.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Invetsasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
4	Program Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Kepuasan Investor (angka)	89,65	785.000,00	Program Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Kepuasan Investor (angka)	89,70	1.085.000,00	
			Jumlah perizinan dan non-perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP (angka)	1036				Jumlah perizinan dan non-perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP (angka)	1064		Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Invetsasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	100%	785.000	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	100%	1.085.000	

	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17 kab/kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	1036 perizinan/ perizinan	550.000	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	1064 perizinan/ perizinan	750.000	Transformasi layanan publik
		Dalam dan Luar Provinsi	Pelaku usaha yang memahami sistem aplikasi perizinan dan non perizinan online dalam rangka mengurus izin	100 orang		Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam dan Luar Provinsi	Pelaku usaha yang memahami sistem aplikasi perizinan dan non perizinan online dalam rangka mengurus izin	100 orang		Transformasi layanan publik
		Dalam dan Luar Provinsi	Petugas PTSP terlatih	100 orang		Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam dan Luar Provinsi	Petugas PTSP terlatih	100 orang		Transformasi layanan publik
		Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah peta digital sebaran izin di DPMPTSP Prov. Sumsel	17 Kab/Kota		Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah peta digital sebaran izin di DPMPTSP Prov. Sumsel	17 Kab/Kota		Transformasi layanan publik

	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	17 kab/kota	Jumlah Perusahaan/investor yang terlayani prima	50 perusahaan	235.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	17 kab/kota	Jumlah Perusahaan/investor yang terlayani prima	50 perusahaan	335.000	Tansformasi Layanan Publik
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	17 kab/kota	Jumlah perusahaan/ investor yang berpartisipasi	60 orang		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	17 kab/kota	Jumlah perusahaan/ investor yang berpartisipasi	60 orang		Tansformasi Layanan Publik
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	17 kab/kota	Jumlah Laporan hasil penyusunan IKI	10 laporan		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	17 kab/kota	Jumlah Laporan hasil penyusunan IKI	10 laporan		Tansformasi Layanan Publik
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	17 kab/kota	Jumlah aplikasi pelayanan publik yang tersedia	1 aplikasi		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	17 kab/kota	Jumlah aplikasi pelayanan publik yang tersedia	1 aplikasi		Tansformasi Layanan Publik
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		tercapainya nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	30,26 T	1.257.052	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman		tercapainya nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	32,37 T	1.350.000	

						Modal					
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha	90%	1.257.052	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha	95%	1.350.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	17 kab/kota	Jumlah LKPM online perusahaan PMDN yang dipantau	1400 LKPM	228.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	17 kab/kota	Jumlah LKPM online perusahaan PMDN yang dipantau	160 LKPM	300.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 kab/kota	Jumlah perusahaan/ investor yang dibina tentang peraturan pelaksanaan penanaman modal	580 Pelaku Usaha	580.550	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 kab/kota	Jumlah perusahaan/ investor yang dibina tentang peraturan pelaksanaan penanaman modal	180 Pelaku Usaha	600.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	17 kab/kota	Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme/ pelaksanaan BAP	74 BAP	448.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	17 kab/kota	Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme/ pelaksanaan BAP	100 BAP	450.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	7%	220.000	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	7%	450.000	

	Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi		Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.	100%	220.000	Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi		Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.	100%	450.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam dan Luar Provinsi	jumlah database yang dimutakhirkan	1 database	150.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam dan Luar Provinsi	jumlah database yang datanya dimutakhirkan	1 database	200.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
		Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah kab/kota yang mengimplementasikan PIR/SAI	17 kab/kota	70.000		Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah kab/kota yang mengimplementasikan SIPID	17 kab/kota	250.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
				Jumlah	25.195.480					27.744.345	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dibidang urusan penanaman modal masyarakat tidak secara langsung bisa mengusulkan program dan kegiatan, guna peningkatan pelayanan yang menjadi perhatian adalah perbaikan sarana dan prasarana kantor,

Tabel 2.4 (T.C. 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sumatera Selatan

Nama OPD: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumsel

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Tidak Ada	.	.	.	.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.”

RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0% /tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5–7,0 %, tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara 4,0 - 4,6%, dan gini ratio mencapai 0,370-0,374. Target RPJMN ini menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal tahun 2020.

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal RI

Dalam dokumen Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Tahun 2020-2024, Visi BKPM RI adalah: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tujuan BKPM Tahun 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatkan realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu strategis di bidang penanaman modal di Sumatera Selatan serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2019-2023, maka ditetapkan Visi dan Misi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 yaitu :

VISI : “Provinsi Tujuan Investasi Utama Berbasis Sumber daya Lokal

Yang Berdaya Saing Guna mendukung Sumsel Maju Untuk Semua”

MISI :

1. Mendorong Terciptanya Iklim Investasi Yang Berdaya Saing
2. Meningkatkan Investasi Yang Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Selanjutnya berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran bidang Penanaman Modal yang tercantum didalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023, yaitu :

Tujuan

1. Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Sasaran

1. Maju Investasi, industri dan perdagangan (Meningkatnya investasi, industri dan perdagangan)
2. Maju pelayanan publik berkualitas (Meningkatnya pelayanan publik berkualitas)

3.3. Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2016-2033 serta arahan Gubernur Sumatera Selatan.

Arahan tersebut menuntun Provinsi Sumatera Selatan pada prioritas pembangunan daerah sekaligus strategi terhadap penjabaran Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2019-2023.

Arah kebijakan dan strategi di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 pada:

1.	Misi 1	:	Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan
	Tujuan 1	:	Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah
	Sasaran 2	:	Maju investasi, industri dan perdagangan (meningkatnya investasi, industri dan perdagangan)
	Strategi	:	a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor; b. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing; c. Mengembangkan strategi promosi dan potensi peluang investasi; d. Penguatan regulasi/deregulasi penanaman modal untuk memberikan kepastian hukum bagi investor/pelaku usaha; e. Mendorong percepatan beroperasinya KEK Tanjung Api-api dan kawasan insustri lainnya;
2.	Misi 3	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
	Tujuan 4	:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan.
	Sasaran 1	:	Maju pelayanan publik berkualitas (meningkatnya pelayanan publik berkualitas).
	Strategi	:	a. Meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, tepat, mudah dan inklusif b. Mengembangkan sistem aplikasi pelayanan online berbasis IT terintegrasi c. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan perizinan d. Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik (pelayanan perizinan/non perizinan maupun pelayanan pengaduan

			perizinan dan non perizinan) baik secara manual maupun online; e. Penguatan regulasi/deregulasi pelayanan perizinan dan non perizinan
--	--	--	--

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dan tujuan serta sasaran yang hendak dicapai BPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 3.2.
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Provinsi Sumsel
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Prov. Sumsel	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing				
1.	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Rendahnya realisasi investasi PMA dan PMDN	Masih ada pengusaha/investor yang belum menjalankan LKPM secara berkala	Adanya upaya pengembangan peluang usaha baru yang bernilai investasi guna menarik minat investor
			Kurangnya proaktif aparat dalam upaya memfasilitasi UKM dgn perusahaan besar	Minat perusahaan besar untuk bermitra dengan UKM

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatandaya saing penanaman modal	wewenang perizinan belum sepenuhnya Pelimpahan kepada PTSP	Masih kurangnya tenaga teknis dan pelayanan perizinan yang kompeten dibidangnya	Implementasi OSS yang sepenuhnya dipusatkan di PTSP
3.	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM		Masih terbatasnya aparat yang kompeten di bidang penanaman modal	Tersedianya bimbingan teknis penanaman modal yang diadakan oleh kemendagri dan BKPM
			Terbatasnya sarana prasarana dalam menunjang operasional pelayanan penanaman modal	Adanya barang hibah dari BKPM untuk menunjang operasional pelayanan
Tujuan 2 : Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan				
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Belum semua perusahaan/investor yang bernilai investasi menjalankan LKPM	Terbatasnya anggaran pembinaan dan pengawasan	Tersedianya dana APBN untuk pembinaan dan pengawasan penanaman modal
		Belum optimalnya koordinasi antara aparat dengan pengusaha/investor	Belum adanya kegiatan koordinasi/pertemuan dengan pengusaha/investor yang dilakukan kontinyu	Adanya Forum investasi nasional dan daerah

			Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pembinaan dan pengawasan penanaman modal masih terbatas	Tersedianya LKPM online
2.	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Belum terupdatenya data potensi peluang investasi daerah	Belum semua kab/kota mengimplementasikan SIPID	Pertemuan dan pelatihan SIPID oleh BKPM secara berkala
		Promosi yang berkualitas memerlukan anggaran yang tidak sedikit, sedangkan biaya promosi terbilang mahal	Minimnya anggaran promosi investasi	Kerjasama antar instansi terkait dan perusahaan dalam rangka memaksimalkan kegiatan promosi investasi
3.	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Belum tersedianya regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan kerjasama investasi	Belum sinergisnya koordinasi kerjasama dibidang penanaman modal antara provinsi dengan kab/kota	UU NO.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
				Dilaksanakannya event-event nasional dan internasional dalam rangka promosi investasi
4.	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan	Masih kurangnya kegiatan koordinasi dan rapat koordinasi teknis perencanaan	Tidak tersedianya dana untuk rakor dikarenakan terbatasnya anggaran	Pergub No. 6 tahun 2014 ttg Rencana Umum Penanaman Modal

	implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	penanaman modal dengan kab/kota		
		Belum dilaksanakannya kegiatan sinkronisasi program kegiatan penanaman modal		Pro aktif kab/kota dalam konsultasi sinkronisasi program kegiatan ke provinsi dan ke BKPM

Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Strategi dan Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang berguna untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DPMPTSP dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan :

1. Strategi dan arah kebijakan Nasional Penanaman Modal yang tertuang dalam RPJMN 2010-2024
2. Strategi dan arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2020-2024
3. Strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 dapat diurai sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor;
2. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;

3. Mengembangkan strategi promosi dan potensi peluang investasi;
4. Penguatan regulasi/deregulasi penanaman modal untuk memberikan kepastian hukum bagi investor/pelaku usaha;
5. Mendorong percepatan beroperasinya KEK Tanjung Api-api dan kawasan industri lainnya;
6. Menelaah dan merumuskan rencana umum penanaman modal daerah yang sesuai kondisi kebutuhan daerah kedepan;
7. Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata;
8. Melakukan identifikasi dan menentukan sektor-sektor unggulan di daerah dalam pengembangan penanaman modal melalui sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID);
9. Menghimpun data perkembangan realisasi investasi dan informasi masalah dan hambatan penanaman modal di perusahaan;
10. Konsep pelaksanaan strategi promosi yang berorientasi pada *bussiness to business*;
11. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan penguatan peran DPMPTSP sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik;
12. Mendorong pengembangan UMKM melalui kemitraan dengan PMA/PMDN;
13. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
14. Meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, tepat, mudah dan inklusif;
15. Mengembangkan sistem aplikasi pelayanan online berbasis IT terintegrasi;
16. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan perizinan;
17. Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik (pelayanan perizinan/non perizinan maupun pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan) baik secara manual maupun online;
18. Penguatan regulasi/deregulasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
19. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
20. Mengoptimalkan proses perizinan dengan pengutamaan kepentingan publik/calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan;

21. Optimalisasi penggunaan aplikasi pelayanan online dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan (pelayanan birokrasi yang berbasis IT).

Sedangkan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan koordinasi serta meningkatkan kerja sama antar instansi dan antar daerah, dengan asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan investasi penanaman modal;
2. Menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan profesionalitas dalam pelaksanaan investasi;
3. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;
4. Meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal antar instansi dan antar kabupaten/kota;
5. Menjaga agar pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memfasilitasi percepatan pembangunan dan pengembangan KEK tanjung Api-api;
7. Mengupayakan tersedianya konsep rencana umum penanaman modal yang jelas dan akurat sesuai dengan kebutuhan daerah kedepan;
8. Meningkatkan efisiensi investasi yang mencakup optimalisasi sumber daya alam guna pengembangan investasi yang berfokus pada sektor-sektor unggulan daerah;
9. Melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap implementasi Sistem informasi potensi peluang investasi penanaman modal yang terintegrasi;
10. Melakukan pengawasan dan fasilitasi LKPM dan penyelesaian masalah dan hambatan (debottlenecking) yang dihadapi oleh perusahaan;
11. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan temu calon investor/investor guna meningkatkan kualitas promosi;
12. Fasilitasi kerjasama penanaman modal baik asing maupun domestik dengan melakukan advokasi antar pemerintah ataupun dengan pihak swasta;
13. Memfasilitasi UMKM untuk bermitra dengan pengusaha PMA/PMDN;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan secara berkala;
15. Mengimplementasikan standar operasional prosedur yang jelas terhadap semua jenis pelayanan perizinan/non perizinan;

16. Melakukan pengawasan terhadap implementasi penggunaan pelayanan perizinan/non perizinan berbasis IT (OSS dan Si Cantik Cloud);
17. Mengikutsertakan ASN DPMPTSP pada berbagai pelatihan yang berhubungan dengan penanaman modal untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi;
18. Memberikan insentif penanaman modal bagi ASN DPMPTSP;
19. Mendorong pelaksanaan pelayanan prima dan berbasis IT baik dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan maupun penanganan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan;
20. Melakukan penyempurnaan regulasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
21. Memberi kemudahan berusaha bagi calon investor dan investor dengan peraturan-peraturan daerah yang tidak memberatkan;
22. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan perizinan/non perizinan;
23. Melakukan pengawasan terhadap optimalisasi Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
24. Memfasilitasi calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan;
25. Mengupayakan pelayanan prima yang sesuai dengan SOP perizinan dan penggunaan aplikasi online dalam setiap proses perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPMPTSP dalam periode lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah DPMPTSP dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Sumsel Maju Untuk Semua

Misi 1.: Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun di pedesaan

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	Maju Investasi industri dan perdagangan (Meningkatnya investasi, industri dan perdagangan	1	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor	1	Harmonisasi dan koordinasi serta meningkatkan kerja sama antar instansi dan antar daerah, dengan asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan investasi penanaman modal
		2	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	2	Menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan profesionalitas dalam pelaksanaan investasi
		3	Mengembangkan strategi promosi dan potensi peluang investasi	3	Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;

				4	Meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal antar instansi dan antar kabupaten/kota
		4	Penguatan regulasi/deregulasi penanaman modal untuk memberikan kepastian hukum bagi investor/pelaku usaha	5	Menjaga agar pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		5	Mendorong percepatan beroperasinya KEK Tanjung Api-api dan kawasan industri lainnya	6	Memfasilitasi percepatan pembangunan dan pengembangan KEK Tanjung Api-api
		6	Updating rumusan rencana umum penanaman modal daerah secara menyeluruh	7	Mengupayakan tersedianya konsep rencana umum penanaman modal yang jelas dan akurat sesuai dengan kebutuhan daerah kedepan
		7	Menciptakan peluang investasi agar dapat	8	Meningkatkan efisiensi investasi yang mencakup optimalisasi sumber daya alam guna

			memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata		pengembangan investasi yang berfokus pada sektor-sektor unggulan daerah
		8	Melakukan identifikasi dan menentukan sektor-sektor unggulan di daerah dalam pengembangan penanaman modal melalui sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	9	Melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap Implementasi Sistem informasi potensi peluang investasi penanaman modal yang terintegrasi
		9	Menghimpun data perkembangan realisasi investasi dan informasi masalah dan hambatan penanaman modal di	10	Melakukan pengawasan dan fasilitasi LKPM dan penyelesaian masalah dan hambatan (debottlenecking) yang dihadapi oleh perusahaan;

			perusahaan;		
		10	Konsep pelaksanaan strategi promosi yang berorientasi pada bussiness to business	11	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan temu calon investor/investor guna meningkatkan kualitas promosi
		11	Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan penguatan peran DPMPTSP sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestic	12	Fasilitasi kerjasama penanaman modal baik asing maupun domestik dengan melakukan advokasi antar pemerintah ataupun dengan pihak swasta
		12	Mendorong pengembangan UMKM melalui kemitraan	13	Memfasilitasi UMKM untuk bermitra dengan pengusaha PMA/PMDN;

			dengan PMA/PMDN		
		13	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penanaman modal	14	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan secara berkala
Misi 3.: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Maju pelayanan publik berkualitas (meningkatnya pelayanan publik berkualitas)	1	Meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, tepat, mudah dan inklusif	1	Mengimplementasikan standar operasional prosedur yang jelas terhadap semua jenis pelayanan perizinan/non perizinan;
		2	Mengembangkan sistem aplikasi pelayanan online berbasis IT terintegrasi	2	Melakukan pengawasan terhadap Implementasi penggunaan pelayanan perizinan/non perizinan berbasis IT (OSS dan Si Cantik Cloud)
		3	Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan perizinan	3	Mengikutsertakan ASN DPMPTSP pada berbagai pelatihan yang berhubungan dengan penanaman modal untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi

				4	Memberikan insentif penanaman modal bagi ASN DPMPTSP
		4	Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik (pelayanan perizinan/non perizinan maupun pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan) baik secara manual maupun online	5	Mendorong pelaksanaan pelayanan prima dan berbasis IT baik dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan maupun penanganan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan.
		5	Penguatan regulasi/deregulasi pelayanan perizinan dan non perizinan	6	Melakukan penyempurnaan regulasi pelayanan perizinan dan non perizinan
				7	Memberi kemudahan berusaha bagi calon investor dan investor dengan peraturan-peraturan daerah yang tidak memberatkan
		6	Peningkatan kualitas dan kuantitas	8	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan perizinan/non

			sarana dan prasarana pelayanan di fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan		perizinan;
		7	Mengoptimalkan proses perizinan dengan pengutamaan kepentingan	9	Melakukan pengawasan terhadap optimalisasi Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
			publik/ calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan;	10	Memfasilitasi calon investor/investor dalam proses perizinan dan non perizinan
		8	Optimalisasi penggunaan aplikasi pelayanan online dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan (pelayanan birokrasi yang berbasis IT)	11	Mengupayakan pelayanan prima yang sesuai dengan SOP perizinan dan penggunaan aplikasi online dalam setiap proses perizinan dan non perizinan

3.4. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2019-2023, berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, serta hasil pembahasan dan pemetaan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan menyusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 6 Program, 13 Kegiatan, dan 40 Subkegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi		
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		1.1.6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

		1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
		1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		1.2.4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		1.2.5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
		1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		1.5.1	Pengadaan Mebel
	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
		1.7.4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		1.7.5	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		2.1.1	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal
	2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
		2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
		2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
3	Program Promosi Penanaman Modal		
	3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi
		3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
4	Program Pelayanan Penanaman Modal		
	4.1	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		4.1.1	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

		4.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
		5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
	6.1	Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	
		6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Secara rinci program, kegiatan dan Subkegiatan di atas dapat dilihat pada Tabel 3.1. (T.C.33) terlampir.

Tabel 3.1. (Tabel 33)

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan
Hasil Penyesuaian Nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

No.	Usuran/Bidang Urusan	RPJMD / Renstra PD Tahun 2019-2023 (Permendagri 13 Tahun 2006)						Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Usuran Wajib / Bidang Urusan enanaman Moda							2,18	Bidang Urusan Penanaman Modal										
1						Perangkat Daerah		2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi yang tercapai		100%	#####			100%	#####		
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan nilai investasi (%)	7				2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		100%	335.000.000			100%	560.000.000	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	reformasi Akuntabilitas Kinerja
					Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (Program / Kegiatan) dengan Kab/kota dan K/L	Jumlah tersedianya dokumen perencanaan OPD tahun n+1	1 Dok Renja 2023	2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD tahun n+1 yang tersusun	Palembang	2 Dokumen (Renstra revisi, dan Renja 2022)	200.000.000	PAD		2 Dokumen (Renstra, dan Renja 2023)	350.000.000	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	reformasi Akuntabilitas Kinerja
								2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	25.000.000	PAD		1 Dokumen	25.000.000	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	reformasi Akuntabilitas Kinerja

							2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	20.000.000	PAD		1 Dokumen	20.000.000	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	reformasi Akuntabilitas Kinerja
							2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	20.000.000	PAD		1 Dokumen	20.000.000	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	reformasi Akuntabilitas Kinerja
							2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	Palembang	1 Dokumen	15.000.000	PAD		1 Dokumen	15.000.000	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	reformasi Akuntabilitas Kinerja
		Program Peningkatan/ Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/ Berkembang	100%			2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		100%				100%		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	reformasi Akuntabilitas Kinerja
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan laporan	2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang tersusun	Palembang	1 Laporan	25.000.000	PAD		1 Laporan	40.000.000	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	reformasi Akuntabilitas Kinerja
							2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Palembang	4 Laporan	30.000.000			4 Laporan	90.000.000	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	reformasi Akuntabilitas Kinerja
							2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana		100%	#####			100%	#####		
							2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Palembang	100%	16.296.808.000	PAD		1 tahun	16.296.808.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung Adm perkantoran yang terbayar jasanya setiap bulan	2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Jumlah tenaga pendukung Adm perkantoran yang terbayar jasanya setiap bulan selama 1 tahun	Palembang	34 orang 1 tahun	812.760.000	PAD		1 tahun	812.760.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik

						selama 1 tahun													
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terbayarnya jasa 2 org pengelola adm keuangan	7 org / 84 Bulan	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terbayarnya jasa 2 org pengelola adm keuangan	Palembang	7 org / 84 Bulan	92.640.000	PAD		7 org / 84 Bulan	92.640.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran / akhir tahun	jumlah laporan keuangan semesteran akhir tahun SKPD	1 Laporan	2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palembang	1 Laporan	10.000.000	PAD		1 Laporan	10.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
								2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD	Palembang	18 Laporan	15.000.000	PAD		18 Laporan	20.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%				2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai		100%	153.560.000			100%	360.000.000		
					Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah stel pakaian Olahraga untuk aparatur	120 stel	2.18.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah stel pakaian Olahraga untuk aparatur	Palembang	-	-	PAD		120 stel	120.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	120 stel	2.18.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas kuning kaki untuk aparatur	Palembang	120 stel	103.560.000	PAD		120 stel	120.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%				2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai		100%				100%			

					Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur DPMPTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus	8 Orang	2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus	Dalam dan Luar Provinsi	10 Orang	50.000.000	PAD		8 Orang	120.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%				2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai		100%	903.683.600			100%	1.311.000.000		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah unit/pcs tersedianya komponen instalasi listrik	1 tahun	2.18.01.1.06..01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit/pcs tersedianya komponen instalansi listrik	Palembang	1 tahun	30.000.000	PAD		1 tahun	40.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	35 unit	2.18.01.1.06..02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Palembang	25 unit	119.683.600	PAD		35 unit	250.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah unit tersedianya peralatan dan jumlah pcs bahan pembersih yang tersedia	300 buah	2.18.01.1.06..04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan jumlah pcs bahan pembersih yang tersedia	Palembang	300 buah	28.000.000	PAD		300 buah	35.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pcs tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	2.18.01.1.06..04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pcs tersedianya Alat Tulis Kantor	Palembang	1 tahun	125.000.000	PAD		1 tahun	150.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekuensi penyediaan makan dan minum untuk rapat/tamu	1 tahun	2.18.01.1.06..04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi penyediaan makan dan minum untuk rapat/tamu	Palembang	1 tahun	80.000.000	PAD		1 tahun	110.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	2.18.01.1.06..05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan	Palembang	1 tahun	90.000.000	PAD		1 tahun	125.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah expemplar/ buku yang tersedia	2160 eksemplar	2.18.01.1.06..06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah expemplar/ buku yang tersedia	Palembang	2160 eksemplar	11.000.000	PAD		2160 eksemplar	51.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang diikuti	90 kali (30 DD, 60 LD)	2.18.01.1.06..09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Dalam dan Luar Provinsi	120 kali (59 DD, 60 LD, 1 LN)	420.000.000	PAD		90 kali (30 DD, 60 LD)	550.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100%				2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tercapai		100%	1.234.000.000			100%	935.000.000		
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang tersedia	2 unit (R-4)	2.18.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang tersedia	Palembang	-	-	PAD		2 unit (R-4)	740.000.000	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Pengadaan Meubeleur	Jumlah jenis meubeleur yang tersedia	15 unit	2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis meubeleur yang tersedia	Palembang	15 unit	105.000.000	PAD		15 unit	195.000.000	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Area Tempat Parkir kendaraan bermotor yang tersedia	1 unit		480.000.000						
										Jumlah Normalisasi dan rehabilitasi saluran lingkungan kantor DPMPTSP yang tersedia	1 unit		450.000.000						
										Tersedianya Interior Ruang Media Center PTSP	1 unit		199.000.000						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%				2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai		100%	578.400.000			100%	682.000.000		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersedia	400 dok/surat	2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersedia	Palembang	400 dok/surat	8.000.000	PAD		400 dok/surat	12.000.000	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik

					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, listrik, telpon, dan internet	Jumlah rekening jasa komunikasi, PDAM, dan listrik yang dibayar	48 Kwitansi rekening	2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, PDAM, dan listrik yang dibayar	Palembang	48 Kwitansi rekening	375.000.000	PAD		48 Kwitansi rekening	450.000.000	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Frekuensi terbayarnya jasa tutor SKJ	1 tahun	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi terbayarnya jasa tutor SKJ	Palembang	1 tahun	15.400.000	PAD		1 tahun	20.000.000	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Frekuensi tersedianya jasa kebersihan gedung kantor	1 tahun	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi tersedianya jasa kebersihan gedung kantor	Palembang	1 tahun	180.000.000	PAD		1 tahun	200.000.000	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100%				2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional		100%	671.577.000			100%	696.108.800		0
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan tersedia operasionalnya	15 unit (5 R2, 10 R4/ Bln)	2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan tersedia operasionalnya	Palembang	15 unit (5 R2, 10 R4/ Bln)	330.000.000	PAD		16 unit (5 R2, 11 R4/ Bln)	426.108.800	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	1 tahun	40.000.000	PAD		1 tahun	60.000.000	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
					Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara	Palembang	1 tahun	198.577.000	PAD		1 tahun	210.000.000	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintah	Transformasi Layanan Publik
										Jumlah pagar kantor yang direhabilitasi	Palembang	1 unit	103.000.000	PAD					

2								2.18.02.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi		7%	750.000.000			7%	#####		
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan nilai investasi (%)	7				2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadikewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang tercapai		100%	500.000.000			100%	650.000.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Iklim Investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
					Peningkatan fasilitas terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar/menengah dan UKM			2.18.02.1.01.01	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kemitraan/ kesepakatan dan Jumlah Kajian Kemitraan	17 kab/kot a	20 kerjsasama (17 kab/kota), 1 Dokumen Kajian	250.000.000	PAD		38 kerja sama	650.000.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Iklim Investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
										Jumlah Perda yang direvisi	Palembang	1 perda revisi	250.000.000						
								2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase peta potensi investasi provinsi yang tersusun		100%	250.000.000			100%	700.000.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Iklim Investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
					Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 RUPMP revisi	2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah RUPM yang dievaluasi	Dalam dan Luar Provinsi	3 RUPMP	90.000.000	PAD		15 RUPM	300.000.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Iklim Investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan

					Pemetaan potensi dan peluang investasi daerah	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1 dokumen	2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah dokumen kajian pemetaan potensi dan peluang investasi	Dalam dan Luar Provinsi	1 dokumen	160.000.000	PAD		1 paket dokumen	400.000.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Iklim Investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenaga kerjaan
3								2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (trilyun)		20,47	1.080.000.000			21,90	#####		
										Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (trilyun)		9,79					10,47		
		Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Nilai Realisasi investasi PMA dan PMDN (Trilyun Rp)	30,26				2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase promosi penanaman modal yang diselenggarakan		100%	1.080.000.000			100%	#####		
				Penyediaan Sarana/Prasarana Promosi	Jumlah tersedianya sarana prasarana promosi	15 jenis	2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Promosi, Jumlah website dan Media sosial yang dikelola	Dalam dan Luar Daerah	1 Event, 2 Jenis	430.000.000	PAD		5 kegiatan	630.000.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Iklim Investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenaga kerjaan	
				Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran yang diikuti	2 kegiatan	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah pameran yang diikuti, Tersedianya Sarana dan Sarana, serta Website dan Media Sosial yang dikelola	Dalam dan Luar Daerah	3 Event, 3 Jenis, 2 Jenis	650.000.000	PAD		2 kegiatan	850.000.000	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Iklim Investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenaga kerjaan	
4								2.18.04.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Investor (angka)		89,65	#####			89,70	#####		

									Jumlah perizinan dan non-perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP (angka)		1036				1064		Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Iklim Investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP (angka)	1036				2.18.04.1.02	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan		100%	785.000.000			100%	1.100.000.000	
				Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	1036 perizinan/ perizinan	2.18.04.1.02.01	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	Dalam dan Luar Provinsi	1036 perizinan/ nonperizinan	550.000.000	PAD		1064 perizinan/ perizinan	750.000.000	Penguatan Kualitas Layanan terpadu satu pintu dan adm satu atap	Transformasi layanan publik
				Pengembangan sistem aplikasi srikandi cloud dan srikandi	Pelaku usaha yang memahami sistem aplikasi perizinan dan non perizinan online dalam rangka mengurus izin	100 orang	2.18.04.1.02.01	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku usaha yang memahami sistem aplikasi perizinan dan non perizinan online dalam rangka mengurus izin	Dalam dan Luar Provinsi	100 orang		PAD		100 orang		Penguatan Kualitas Layanan terpadu satu pintu dan adm satu atap	Transformasi layanan publik
				Peningkatan Kapasitas Petugas PTSP untuk sistem aplikasi online terintegrasi	Petugas PTSP terlatih	100 orang	2.18.04.1.02.01	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Petugas PTSP terlatih	Dalam dan Luar Provinsi	100 orang		PAD		100 orang		Penguatan Kualitas Layanan terpadu satu pintu dan adm satu atap	Transformasi layanan publik

					Workshop peningkatan kinerja pelayanan sistem aplikasi perizinan online	Jumlah peta digital sebaran izin di DPMPTSP Prov. Sumsel	17 Kab/Kota	2.18.04.1.02.01	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah peta digital sebaran izin di DPMPTSP Prov. Sumsel	Dalam dan Luar Provinsi	17 Kab/Kota		PAD		17 Kab/Kota		Penguatan Kualitas Layanan terpadu satu pintu dan adm satu atap	Transformasi layanan publik
					Penanganan Pengaduan Prima Pada Penyelenggaraan Perizinan Terpadu	Jumlah Perusahaan/investor yang terlayani prima	50 perusahaan	2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Perusahaan/investor yang terlayani prima	17 kab/kota	50 perusahaan	235.000.000	PAD		50 perusahaan	350.000.000	Penguatan Kualitas Layanan terpadu satu pintu dan adm satu atap	Transformasi Layanan Publik
					Diseminasi informasi kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah perusahaan/ investor yang berpartisipasi	60 orang	2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah perusahaan/ investor yang berpartisipasi	17 kab/kota	60 orang		PAD		60 orang		Penguatan Kualitas Layanan terpadu satu pintu dan adm satu atap	Transformasi Layanan Publik
					Penyusunan Survey Index Kepuasan Investor	Jumlah Laporan hasil penyusunan IKI	10 laporan	2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan hasil penyusunan IKI	17 kab/kota	10 laporan		PAD		10 laporan		Penguatan Kualitas Layanan terpadu satu pintu dan adm satu atap	Transformasi Layanan Publik
								2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah aplikasi pelayanan publik yang tersedia	17 kab/kota	1 aplikasi		PAD		1 aplikasi		Penguatan Kualitas Layanan terpadu satu pintu dan adm satu atap	Transformasi Layanan Publik
5								2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	tercapainya nilai realisasi investasi PMA dan PMDN		30,26 T	1.257.052.000			32,37 T	#####		

		Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Nilai Realisasi investasi PMA dan PMDN (Trilyun Rp)	30,26				2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha		90%	1.257.052.000			95%	#####		
					Peningkatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (PMA/PMDN)	Jumlah LKPM online perusahaan PMDN yang dipantau	1400 LKPM	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM online perusahaan PMDN yang dipantau	17 kab/kota	1400 LKPM	228.500.000	PAD		160 LKPM	350.000.000	perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenaga kerjaan
					Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN	Jumlah perusahaan/ investor yang dibangun tentang peraturan pelaksanaan penanaman modal	180 Pelaku Usaha	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan/ investor yang dibangun tentang peraturan pelaksanaan penanaman modal	6 kab/kota	580 Pelaku Usaha/ investor	580.550.000	PAD		180 Pelaku Usaha	700.000.000	perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenaga kerjaan
					Peningkatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (PMA/PMDN)	Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme/ pelaksanaan BAP	40 BAP	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme/ pelaksanaan BAP	17 kab/kota	74 BAP	448.002.000	PAD		100 BAP	575.000.000	perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dan termasuk reformasi Ketenaga kerjaan
6								2.18.06.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)		7%	220.000.000			7%	550.000.000		
		Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Nilai Realisasi investasi PMA dan PMDN (Trilyun Rp)	30,26				2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat	Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.		100%	220.000.000			100%	550.000.000		

									Daerah Provinsi										
					Pengembangan SIPID	jumlah database yang datanya dimutakhirkan	1 database	2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah database yang datanya dimutakhirkan	Dalam dan Luar Provinsi	1 database	150.000.000	PAD		1 databas e	350.000.000	perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Invetsasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
					Pemutakhiran data dan informasi investasi PM	Jumlah kab/kota yang mengimple mentasikan SIPID	17 kab/kota			Jumlah kab/kota yang mengimplementasikan SIPID	Dalam dan Luar Provinsi	17 kab/kota	70.000.000	PAD		17 kab/kota	200.000.000	perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Invetsasi dan termasuk reformasi Ketenagakerjaan
												Jumlah	##### ###				##### #####		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, serta berdasarkan hasil pembahasan dan pemetaan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan menyusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 6 Program, 13 Kegiatan, dan 41 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. **25.675.932.540,00** (Dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi		
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		1.1.6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
	1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	1.2.4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
	1.2.5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
	1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.5.2	Pengadaan Mebel
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

		1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
		1.7.4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		1.7.5	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		2.1.1	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal
	2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
		2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
		2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
3	Program Promosi Penanaman Modal		
	3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi
		3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
4	Program Pelayanan Penanaman Modal		
	4.1	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		4.1.1	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		4.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

		5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
	6.1	Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	
		6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Tabel 4.2.) terlampir.

TABEL 4.2

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening						Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Semula	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7
2	18					Bidang Urusan Penanaman Modal					
2	18	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai		100%	Rp 22.535.932.540	
2	18	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Palembang	100%	Rp 85.000.000	
2	18	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD tahun n+1 yang tersusun	Palembang	2 Dokumen (Renstra revisi, dan Renja 2022)	Rp 10.000.000	
2	18	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Palembang	1 Dokumen	Rp 25.000.000	
2	18	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Palembang	1 Dokumen	Rp 20.000.000	
2	18	01	1	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Palembang	3 Laporan	Rp 30.000.000	
1	18	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana		100%	Rp 19.951.790.000	

1	18	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Palembang	68 orang ASN	Rp	18.721.460.000	
2	18	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Layanan Umum kantor yang disediakan	Palembang	32 Orang TKS/TKPD	Rp	1.119.690.000	
1	18	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terbayarnya jasa 2 org pengelola adm keuangan	Palembang	7 org / 84 Bulan	Rp	92.640.000	
1	18	01	1	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palembang	2 Laporan (20 exemplar)	Rp	10.000.000	
1	18	01	1	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	5 Laporan (48 Laporan Rekon, 12 Laporan Semester)	Rp	8.000.000	
2	18	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai		100%	Rp	100.000.000	
2	18	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus	Dalam dan Luar Provinsi	8 Orang	Rp	100.000.000	
2	18	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai		100%	Rp	1.229.142.540	
2	18	01	1	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit/pcs tersedianya komponen instalansi listrik	Palembang	1 tahun	Rp	40.000.000	
2	18	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Palembang	unit	Rp	300.000.000	
2	18	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah unit tersedianya peralatan dan jumlah pcs bahan pembersih yang tersedia	Palembang	300 buah	Rp	30.000.000	
2	18	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pcs tersedianya Alat Tulis Kantor	Palembang	1 tahun	Rp	109.142.540	
2	18	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi penyediaan makan dan minum untuk rapat/tamu	Palembang	1 tahun	Rp	120.000.000	
2	18	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan	Palembang	1 tahun	Rp	90.000.000	

2	18	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah expsemplar/ buku yang tersedia	Palembang	2160 eksemplar	Rp	11.000.000	
2	18	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi dan konsultansi yang diikuti	Dalam dan Luar Provinsi	1 tahun	Rp	529.000.000	
2	18	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tercapai		100%	Rp	10.000.000	
2	18	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis meubeleur yang tersedia	Palembang	unit	Rp	10.000.000	
2	18	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai		100%	Rp	700.000.000	
2	18	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersedia	Palembang	400 dok/surat	Rp	12.000.000	
2	18	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, PDAM, dan listrik yang dibayar	Palembang	48 Kwitansi rekening	Rp	468.000.000	
2	18	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi terbayarnya jasa tutor SKJ	Palembang	1 tahun	Rp	20.000.000	
2	18	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Layanan Umum kantor (Jasa Kebersihan) yang disediakan	Palembang	1 tahun	Rp	200.000.000	
2	18	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional		100%	Rp	460.000.000	
2	18	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan tersedia operasionalnya	Palembang	15 unit (5 R2, 10 R4/ Bln)	Rp	330.000.000	
2	18	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Palembang	1 tahun	Rp	70.000.000	

2	18	01	1	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	1 tahun	Rp	40.000.000	
2	18	01	1	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah sarana jaringan yang dipelihara	Palembang	2 jaringan (listrik dan Telepon)	Rp	20.000.000	
2	18	02				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tercapainya Persentase Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal		7%	Rp	850.000.000	
2	18	02	1	01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Provinsi	Tingkat Capaian Penetapan Fasilitas / Insentif Penanaman Modal daerah	Palembang	100%	Rp	120.000.000	
2	18	02	1	01	01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan Daerah / Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Palembang	1 dokumen pergub	Rp	120.000.000	
2	18	02	1	02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Sumatera Selatan	Tingkat Capaian Pembuatan Peta Potensi investasi Provinsi	Palembang	100%	Rp	730.000.000	
2	18	02	1	02	02	Sub Kegiatan penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Sumsel	5 Dokumen	Rp	730.000.000	
2	18	03				Program Promosi penanaman modal	Terlaksananya Penyusunan Strategi dan Pelaksanaan promosi penanaman modal kewenangan Daerah Provinsi			Rp	750.000.000	
2	18	03	1			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tercapainya Promosi penanaman modal kewenangan daerah provinsi			Rp	750.000.000	
2	18	03	1	01	01	Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi	Sumsel & luar sumsel	dokumen	Rp	256.730.000	
2	18	03	1	01	02	Sub Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi, jumlah tersedianya Sarana Prasarana Promosi	Sumsel & luar sumsel	dokumen	Rp	493.270.000	

2	18	04				Program Pelayanan Penanaman Modal	tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan		675 perizinan dan non perizinan	Rp 600.000.000	
2	18	04	1	02		Kegiatan Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan		675 Perizinan dan non perizinan		
2	18	04	1	02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan yang diterbitkan sesuai Standar Operasional Prosedur	17 Kab/kota	675 perizinan dan non perizinan	Rp 400.000.000	
							pelaku usaha yang memahami aplikasi perizinan	17 Kab/kota	100 pelaku usaha		
							Pelaku usaha yang menggunakan peta digital sebaran perizinan dan non perizinan	17 Kab/kota	300 pelaku usaha		
2	18	04	1	02		Kegiatan Penanaman modal yang Menurut Ketentuan peraturan dan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tercapainya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan, yang cepat, terintegrasi, dan transparan	17 Kab/Kota	1006 Perizinan dan non perizinan		
	18	04	1	02	03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan Kewenangan daerah provinsi	17 Kab/Kota	160 Orang	Rp 200.000.000	
2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tercapainya nilai realisasi Invesasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri		32.37 T	Rp 850.000.000	
2	18	05	1	01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanama Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha		95%	Rp 850.000.000	
2	18	05	1	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM online perusahaan yang di pantau	17 Kab/Kota	1500 LKPM	Rp 228.200.000	
2	18	05	1	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan / Investor yang di bina tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal	17 Kab/Kota	180 Pelaku Usaha	Rp 233.200.000	

2	18	05	1	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang di awasi dengan mekanisme / Pelaksanaan BAP	17 Kab/Kota	60 BAP	Rp	388.600.000	
2	18	06				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tercapainyo Rasio Tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi Penanaman Modal	Palembang	1%	Rp	90.000.000	
2	18	06	1	01		Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang terintegresi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Tersedianya data dan sistem informasi Penanaman Modal	Palembang	100%	Rp	90.000.000	
2	18	06	1	01	01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan informasi Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Palembang	3 Dokumen	Rp	90.000.000	
									Jumlah	Rp	25.675.932.540	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 serta menacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 merupakan arahan dan acuan dalam pelaksanaan tugas bagi unit-unit kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Setiap unit kerja harus menyiapkan dan menyusun langkah-langkah perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan hasil maksimal.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini disusun dengan mempedomani kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini merupakan rencana tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
- b. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini merupakan arahan dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja.
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Komitmen dan kerja sama seluruh pegawai, baik aparatur sipil negara maupun tenaga non ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sangat dibutuhkan untuk menjamin tercapainya rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di bidang penanaman modal sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan realisasi investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Sumatera Selatan.

Palembang, 10 Nopember 2022

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapti Yudha Kumia, SE, MM
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 197909012006041008